



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Ogan Komering Ulu Selatan  
Jl. Merdeka Kecamatan Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan  
Telp. (081) 800 246

**PERSETUJUAN  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
NOMOR : 8037 /11 /INDPSPNDPMP/21SP/2019

Partisipangan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30) Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 8215;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lampiran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
4. Penunjukan yang bersangkutan tanggal 14 Oktober 2018 dengan melampirkan Kombinasi Perizinan dan Nonperizinan.


Berdasarkan partisipangan di atas, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Selatan memberikan :

**" PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "**

a. Nama	SITI KOMARIATI
b. Tempat, Tanggal Lahir	Pancar Pungah, 02 Februari 1985
c. Alamat	Desa Datar Kac. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
d. Pekerjaan	KB. JAYA BHAKTI
e. Nomor Induk Berusaha	8120211021949
f. Tanggal	14 Oktober 2019

Dikeluarkan di Muaradua  
pada tanggal 14 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

  
HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198510311985121001



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

0120211021649

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.

Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.



Survei Kesehatan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. SKM bertujuan untuk mengetahui status kesehatan masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan, dan merencanakan program kesehatan.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia, yang Lembaga Pengada dan Penyelenggara OSS berlandaskan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, menbitkan izin komersial dan operasional yang terdapat dalam dokumen ini, setelah melalui proses verifikasi, penilaian, dan pemberian rekomendasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Nama Pemohon	: KIRAJAYA (UMKM)
Nama Lokal Berusaha	: KIRAJAYA (UMKM)
Nama Pemohon	: R. Dina Dina, Dina Dina, Karyawan Murni Pura, Kab. Cilegon, Kecamatan Ulu Selatan, Kecamatan Selatan
Nama RUMAH	: Pemukiman Anak Ulu Selatan Selatan
Kode RUMAH	: 00115

Dokumen ini komersial akan diberikan setelah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan dan Pemeliharaan (izin)

Kegiatan komersial dan operasional akan diberikan setelah proses verifikasi dan penilaian sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini telah selesai. Dokumen ini terdapat dalam dokumen ini, setelah melalui proses verifikasi, penilaian, dan pemberian rekomendasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini komersial akan diberikan setelah sebagai berikut :



Dokumen ini diberikan dan akan diberikan setelah proses verifikasi dan penilaian. Dokumen ini terdapat dalam dokumen ini, setelah melalui proses verifikasi, penilaian, dan pemberian rekomendasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.



## THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

...the ... of ...

2000

© 1999 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA

(Izin Produksi Program atau Sistem Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berbadan hukum Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Produksi Program atau Sistem Pendidikan sebagai berikut:

Nama Pemilik	: R.H. JAYA GEMAKTI
Tempat lahir Beranda	: 01/02/1981/1981
Alamat Pemilik	: R. Dewi Damar
Nama UBL	: PERUSAHAAN KAMAR-KAMAR SWASTA RAYON TULU ATIPALPUSANUS CIBAL
Kode KBL	: 80332
Letak Usaha	
- Alamat	: R. Dewi Damar
- Desa/Kelurahan	: Damar
- Kecamatan	: Mekar (Dua)
- Kabupaten/Kota	: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Provinsi	: Sumatera Selatan

Izin Produksi Program atau Sistem Pendidikan TELAH berlaku efektif.  
Izin Usaha ini berlaku selama pemohon melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dibuatkan tanggal 14 Oktober 2019



Pelaksanaan Izin Usaha OSS ini akan dan dapat berlaku untuk pelaksanaan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Izin Usaha ini dan yang merupakan bagian dari Izin Usaha ini yang berlaku untuk pelaksanaan Izin Usaha ini.